



DIGIWEEK 2024



Policy Communiqué

Sebuah Visi untuk Masa Depan Digital Indonesia

www.cips-indonesia.org/digiweek2024

Apa Itu CIPS DigiWeek?

CIPS DigiWeek adalah rangkaian acara yang diadakan secara tahunan oleh **Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)** sebagai ruang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi, bertukar gagasan, dan menyoroti berbagai tantangan dan isu bersama. Tujuannya adalah mendorong pengembangan solusi kebijakan yang konstruktif dan diskursus untuk menciptakan lingkungan digital yang inovatif dan inklusif bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Tahun 2024 menjadi tahun kelima **CIPS DigiWeek** diadakan. Melalui acara-acara yang diselenggarakan secara langsung dan daring pada **15–19 Juli 2024** di Jakarta, Indonesia, para pembuat kebijakan, pemimpin industri, akademisi, dan masyarakat sipil berpartisipasi dalam lokakarya, webinar, dan diskusi tatap muka untuk belajar, berbagi, dan bersatu untuk membentuk masa depan lanskap digital.

Setiap tahun, CIPS menawarkan **peluang kemitraan kepada perusahaan dan organisasi yang tepat** untuk berkolaborasi dalam acara unggulan ini.

Pendahuluan

Indonesia adalah pemain global yang kian berkembang dalam ekonomi digital, dengan tanggung jawab kepemimpinan yang diembannya selama menjadi tuan rumah G20 2022 dan memegang keketuaan ASEAN 2023. Ditopang oleh nilai ekonomi digitalnya yang mencapai US\$82 miliar pada 2023, Indonesia menguasai pangsa terbesar di Asia Tenggara (40% dari keseluruhan nilai kawasan). Indonesia juga merupakan salah satu destinasi investasi digital yang paling menggiurkan, dengan jumlah keseluruhan aliran investasi ke sektor digital yang mencapai US\$5,1 miliar pada 2022.

Terlepas dari segala kemajuan dan potensi pertumbuhannya, Indonesia menunjukkan paradoks yang menarik: warga digitalnya adalah salah satu yang paling aktif di dunia dan ekosistem *startup*-nya sangat dinamis, tetapi secara keseluruhan masih tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan sektor-sektor utama agar seluruh segmen masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaatnya. Tantangan-tantangan yang terus berlanjut dalam literasi digital, privasi data, dan keamanan siber menggarisbawahi perlunya pendekatan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan didorong oleh inovasi.

Dalam menyusun Policy Communiqué atau Komunike Kebijakan ini, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) secara aktif berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat sipil selama acara DigiWeek 2024 dan rangkaian kegiatan persiapannya. DigiWeek adalah acara unggulan CIPS yang diselenggarakan secara tahunan, yang menyediakan ruang terbuka dan inklusif bagi para pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama membahas dan mencari solusi atas isu-isu spesifik dalam lanskap digital Indonesia yang berkembang pesat.

Pemetaan isu-isu utama dalam pengembangan ekonomi digital untuk pemerintahan selanjutnya sangatlah penting untuk mendorong strategi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Untuk itu, Komunike Kebijakan ini berfokus pada tujuh rekomendasi strategis terkait sektor digital, seperti yang dirinci di halaman berikutnya, yang dianggap penting untuk diprioritaskan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Visi umum yang melandasi rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang mendorong inovasi, melindungi hak, memastikan inklusivitas, serta meningkatkan daya saing global. Kami berharap agar kabinet Indonesia yang baru dapat mempertimbangkan usulan-usulan yang telah diuraikan ini, serta mengakui peran penting ekonomi digital dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dan makmur.

PROPOSAL 1.

Meningkatkan koregulasi dan adopsi instrumen penyusunan kebijakan yang inovatif, seperti *regulatory sandbox*.

Inovasi kebijakan tetap menjadi hal yang utama dalam membentuk iklim regulasi yang memfasilitasi pendalaman transformasi digital Indonesia. Pendekatan kebijakan inovatif yang didorong oleh teknologi dan berbasis data dapat secara efektif menyeimbangkan perkembangan pesat inovasi teknologi digital dengan manajemen risiko, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan publik. Adopsi pendekatan koregulasi atau pengaturan bersama yang memprioritaskan keterlibatan pemangku kepentingan—seperti pakar industri, regulator, otoritas pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil—dapat menciptakan iklim regulasi yang lebih responsif, tepercaya, dan adaptif dalam lanskap digital. Salah satu instrumen kebijakan yang dapat menciptakan keseimbangan ini adalah pendekatan *regulatory sandbox* atau *ruang uji coba terbatas*, di mana inovator dan regulator dapat berkolaborasi, menguji model usaha baru, dan mengembangkan regulasi yang inovatif dalam suatu lingkungan yang terkontrol.

Keterlibatan nyata dan bermakna dengan sektor swasta dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien berkat keahlian dan sumber daya yang dimiliki sektor swasta untuk mengatasi berbagai tantangan kompleks terkait industri dan kekhawatiran masyarakat tentang dampak sosial. Penting untuk menciptakan wadah dialog rutin dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta guna bersama-sama membahas dan membuat kebijakan yang mendukung etika bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, mengurangi hambatan masuk (*barriers to entry*) adalah kunci untuk mendorong persaingan pasar sehingga mendukung usaha-usaha baru dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sektor teknologi finansial atau *fintech* telah menjadi pionir dalam menyeimbangkan inovasi produk dengan kerangka regulasi yang berorientasi pada masa depan melalui *fintech regulatory sandbox*. Ke depannya, harus ada proses yang berlaku untuk memastikan bahwa peserta *sandbox* yang tunduk kepada beberapa regulasi atau yang berada di bawah pengawasan beberapa regulator sekaligus dapat dikelola dan diakomodasi secara efektif. Oleh karena itu, para regulator harus memilih pendekatan *sandbox* yang terkoordinasi untuk merampingkan proses dan mengembangkan skala teknologi, produk, atau model bisnis baru dalam satu pengaturan *sandbox yang terpusat*.

Untuk tujuan tersebut, pemerintahan selanjutnya dapat berfokus untuk melanjutkan upaya pengembangan praktik dan mekanisme *regulatory sandbox* yang sudah ada untuk sektor lainnya—terutama yang bersifat multisektor—di luar sektor teknologi kesehatan dan finansial. Memperbaiki praktik *regulatory sandbox* untuk menguji kebijakan dalam lingkungan nyata dan membuat penyesuaian yang tepat akan meningkatkan kapasitas Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh pesatnya kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknologi emerging lainnya yang semakin banyak digunakan. Kabinet pemerintahan selanjutnya juga perlu mengefisienkan pendekatan koregulasi dan instrumen pembuatan kebijakan yang inovatif, seperti *regulatory sandbox*, di seluruh sektor yang berkembang. Upaya ini akan menumbuhkan pola pikir regulasi yang mengarah kepada fleksibilitas dan keterbukaan terhadap inovasi, serta menghindari regulasi berlebihan yang justru menghambat pertumbuhan sektoral.

PROPOSAL 2.

Melindungi kebebasan berpendapat dan kebebasan internet, serta berfokus pada keamanan pengguna dalam pendekatan untuk memoderasi ranah digital.

Kebutuhan akan moderasi konten yang efektif dan transparan menjadi kian mendesak seiring dengan pertumbuhan pesat pengguna dan konten internet. Baik platform digital milik negara maupun swasta memegang tanggung jawab bersama untuk menjunjung prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi, sekaligus memprioritaskan keamanan pengguna saat berinteraksi di ruang digital. Namun, menurut laporan *Freedom of the Net* dari Freedom House, meningkatnya sensor dari pemerintah melalui permintaan penghapusan konten—yang memaksa platform untuk membatasi konten yang dianggap “negatif” tanpa proses hukum yang adil—mengurangi kebebasan internet di Indonesia.

Langkah-langkah regulasi harus memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang juga berlaku di ruang digital, menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan regulasi platform. Prinsip legalitas, legitimasi, kebutuhan, dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 19(3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) harus diterapkan secara menyeluruh. Seperti halnya kerangka regulasi apa pun yang membatasi kebebasan berekspresi, regulasi yang mengatur perusahaan media sosial harus dilandaskan pada bukti yang kuat serta memprioritaskan kebijakan pendekatan yang paling meminimalkan penyensoran dan pembatasan lainnya dalam mengatasi bahaya di ruang digital.

Di luar langkah-langkah regulasi, seluruh pemangku kepentingan, termasuk individu, harus bersama-sama berupaya menerapkan praktik-praktik ekosistem digital yang aman dan sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dapat berinvestasi lebih banyak pada program-program yang mempromosikan literasi digital dan perilaku daring yang bertanggung jawab di kalangan pengguna internet dan pembuat konten di Indonesia.

PROPOSAL 3.

Memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN untuk mendongkrak daya saing global Indonesia dan memperdalam integrasi pasar regional.

Dengan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (ASEAN Digital Economy Framework Agreement) atau DEFA, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digitalnya dan mengambil posisi strategis dalam mengkapitalisasi berbagai peluang pasar yang ada. Hal ini akan memaksimalkan potensi *e-commerce* lintas negara di ASEAN sehingga memberikan pilihan yang lebih beragam untuk barang jadi, barang setengah jadi, dan jasa kepada konsumen dan UMKM, serta peluang impor-ekspor yang lebih besar kepada pedagang dan penjual. Selain itu, pemerintah dapat berfokus untuk mengembangkan rantai nilai regional di ASEAN dan mengatasi hambatan pembayaran (*payment bottlenecks*) lintas negara guna memastikan transaksi digital yang efisien dan aman di kawasan ini.

Dukungan terhadap inisiatif-inisiatif ini melalui kerangka regulasi domestik dan investasi pada infrastruktur-infrastruktur utama dapat menggiatkan perdagangan regional serta memacu pertumbuhan Indonesia dan sektor bisnisnya. Indonesia telah mendorong percepatan negosiasi DEFA ASEAN dari 2025 menjadi September 2023, selaras dengan komitmen bersama dari negara-negara anggota ASEAN untuk mempercepat transformasi digital. Untuk menyelaraskan arsitektur ekonomi digital regional melalui DEFA, pemerintahan Indonesia selanjutnya harus memprioritaskan integrasi DEFA yang mulus dan berfokus untuk memupuk kerja sama regional dengan menyesuaikan kebijakan digital nasional dengan komitmen DEFA.

PROPOSAL 4.

Memprioritaskan perlindungan privasi data pribadi masyarakat dengan meningkatkan ketahanan siber dan mengadopsi praktik-praktik keamanan data yang kuat.

Dengan berkembangnya berbagai ancaman dan risiko digital, Pemerintah Indonesia harus memprioritaskan strategi keamanan siber yang lebih tangguh dan adaptif, meningkatkan keamanan data, dan menempatkan perlindungan data pribadi masyarakat pada prioritas tertinggi. Hal ini meliputi penerapan kebijakan-kebijakan keamanan data yang kuat, termasuk mempromosikan teknologi yang meningkatkan privasi—seperti alat enkripsi atau anonimisasi—dan membentuk lembaga perlindungan data pribadi yang terbebas dari pengaruh pihak mana pun, termasuk ketiga cabang kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu. Kolaborasi internasional, termasuk dengan sektor swasta dan masyarakat sipil global, dan penyesuaian dengan standar-standar internasional juga tak kalah penting. Selain itu, kerangka perlindungan konsumen nasional yang telah ada perlu diperbarui untuk membentengi dari ancaman penipuan dan kecurangan yang semakin marak sehingga memastikan pendekatan yang komprehensif untuk menjaga hak konsumen daring.

Ketahanan siber adalah pilar penting bagi Indonesia untuk mempertahankan posisinya sebagai hub ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Meski kebijakan hukum yang ada cukup penting, ketiadaan peraturan khusus yang komprehensif untuk mengatur keamanan siber menciptakan risiko respons yang tidak terkoordinasi ketika terjadi serangan siber. Peningkatan ketahanan siber memerlukan harmonisasi regulasi keamanan siber dan adopsi kerangka kerja perlindungan data yang terstandar. Selain itu, dengan mempromosikan literasi digital, kesadaran masyarakat terhadap risiko-risiko siber akan meningkat.

PROPOSAL 5.

Menerapkan pendekatan partisipatoris yang bersifat *bottom-up* untuk menguniversalkan akses terhadap internet berkualitas dan menjembatani kesenjangan digital.

Konektivitas digital yang aksesibel, terjangkau, dan andal akan menunjang akses dan penyediaan layanan penting, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga mendorong kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun, Indonesia masih dihadapkan dengan kesenjangan digital yang besar, di mana jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet di daerah perdesaan bahkan tidak mencapai separuh rumah tangga di perkotaan. Untuk menjembatani kesenjangan ini serta memastikan akses yang universal terhadap internet berkualitas, pemerintah harus memprioritaskan penyediaan internet andal dan berkecepatan tinggi melalui pendekatan yang komprehensif. Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai pemandu dalam ranah digital, harus memimpin inisiatif, membentuk kelompok kerja teknologi komunikasi dan informatika (TIK), serta menyusun peta jalan investasi TIK yang terintegrasi menggunakan pendekatan yang partisipatoris dan bersifat *bottom-up* (bawah ke atas) guna meningkatkan kolaborasi dan transparansi di antara para pemangku kepentingan utama. Keterbukaan infrastruktur terhadap solusi inovatif, seperti teknologi satelit internet, sangat krusial untuk memberikan pilihan yang lebih beragam kepada konsumen dan memastikan akses internet berkualitas bagi semua orang, terutama di daerah terpencil dan terluar.

Lebih jauh, pemerintah perlu memfasilitasi perluasan infrastruktur pembayaran digital di daerah-daerah terpencil untuk mendukung inklusi keuangan. Mendorong partisipasi sektor swasta untuk menawarkan akses internet terjangkau dan memprioritaskan inovasi kebijakan teknologi akan menjadi penting dalam upaya mewujudkan inklusi digital dan keuangan serta memberdayakan masyarakat termarginalkan. Upaya-upaya ini akan memastikan bahwa manfaat transformasi digital akan tersebar secara merata sehingga memacu pertumbuhan ekonomi dan menjembatani kesenjangan digital di Indonesia.

PROPOSAL 6.

Meningkatkan ketahanan infrastruktur digital dan memungkinkan investasi untuk mempersiapkan transformasi digital Indonesia di masa depan.

Seiring terus melangkah menuju transformasi digital, Indonesia perlu mempertimbangkan dan menanggulangi berbagai risiko guncangan serta disrupsi pada infrastruktur digital dengan baik. Hal ini berarti memastikan bahwa pengembangan dan investasi pada infrastruktur digital dapat menunjang kebutuhan masa depan dari transformasi digital, sekaligus meningkatkan kemampuan mitigasi, adaptasi, dan pemulihan cepat dari kejadian-kejadian yang mengganggu, seperti bencana alam, perubahan iklim, konflik, atau serangan siber. Di tengah dinamika global yang memburuk, tekanan perubahan iklim yang meningkat, serta percepatan teknologi yang pesat, regulator harus mengembangkan kebijakan yang tepat untuk memungkinkan investasi yang berkelanjutan pada teknologi digital beserta infrastruktur-infrastruktur pendukungnya.

Memastikan kemudahan investasi dan kepastian berusaha bagi industri yang berhubungan dengan TIK sangatlah penting untuk menarik dan mempertahankan modal di sektor digital Indonesia. Tantangan-tantangan regulasi, seperti masalah perizinan, hambatan nontarif, dan inefisiensi birokrasi harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Kebijakan yang efisien dan memberikan kepastian serta transparansi akan mendorong investasi sektor swasta pada proyek-proyek infrastruktur digital. Dengan menciptakan iklim yang kondusif baik bagi investor domestik maupun asing, Indonesia dapat menyokong perluasan dan modernisasi jaringan infrastruktur digitalnya guna memastikan ketangguhan jangka panjang dan kesiapannya untuk masa depan.

Selain itu, transformasi digital membutuhkan akses terhadap teknologi-teknologi mutakhir, yang banyak di antaranya bersumber dari luar negeri. Kelangkaan *chip* dan volatilitas pasokan logam tanah jarang (*rare earth*) dan mineral berharga menggarisbawahi kerentanan rantai pasok digital Indonesia. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok harus diutamakan dalam agenda infrastruktur digital Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan dengan mendiversifikasi sumber pasokan, membina kemampuan produksi dan modal manusia dalam negeri, serta berkolaborasi dengan mitra-mitra global untuk memastikan akses berkelanjutan terhadap teknologi-teknologi penting.

PROPOSAL 7.

Tidak meninggalkan siapa pun dalam upaya menuju transformasi digital.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 57 juta penduduk Indonesia (20% dari total populasi) tidak memiliki akses internet, menurut survei yang dilakukan pada 2024 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Di samping itu, 28 juta penduduk Indonesia, atau sekitar 1 dari 10 orang, memiliki disabilitas pada 2020. Ini adalah angka besar yang tidak bisa diabaikan, terutama karena mayoritas dari mereka berada dalam usia produktif dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang tinggi. Pengabaian ini dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang memiliki kondisi dan/atau kemampuan khusus.

Maka dari itu, layanan dan teknologi digital harus inklusif dan dapat diakses oleh kelompok-kelompok termarginalkan, termasuk orang-orang dengan disabilitas. Pemerintah harus melibatkan komunitas disabilitas dalam diskusi kebijakan untuk mewujudkan ruang digital yang aksesibel, kepekaan terhadap konteks lokal, penerapan teknologi bantu (assistive technology), dan desain yang universal pada entitas publik dan swasta yang menawarkan layanan digital. Salah satu prinsip (ekonomi) fundamental yang harus dijunjung tinggi adalah bahwa pemenuhan dan perlindungan hak-hak konsumen yang rentan harus dilihat sebagai investasi, alih-alih biaya atau beban.

Perkembangan ekonomi digital dapat menyumbang hingga US\$2,8 triliun tambahan terhadap ekonomi Indonesia pada 2040. Perbaikan infrastruktur pendukung dasar, peningkatan konektivitas, dan akses *broadband* yang merata di daerah-daerah yang kurang terlayani menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran aktor-aktor ekonomi terkait hak-hak disabilitas, memberlakukan standar aksesibilitas pada platform digital untuk berbagai jenis disabilitas dan kemampuan, serta memperkuat kerangka hukum untuk mendorong usaha yang inklusif dan perlindungan konsumen. Program-program literasi digital juga sangat penting untuk memberdayakan masyarakat agar dapat dengan aman menjelajahi dunia digital, menciptakan nilai, dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan komitmen-komitmen ini, pemerintah dan sektor swasta dapat menghubungkan sebanyak mungkin penduduk Indonesia dengan dunia digital. Aksesibilitas digital sangatlah krusial dan harus menjadi prioritas agar tidak ada seorang pun yang tertinggal, serta akses yang merata terhadap layanan digital esensial untuk semua segmen masyarakat dapat tercapai.



TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.



Untuk Indonesia yang Bebas dan Sejahtera

🌐 www.cips-indonesia.org

📧 [cips_id](https://twitter.com/cips_id)

📺 [Center for Indonesian Policy Studies](#)

Jalan Terogong Raya No. 6B, Cilandak
Jakarta Selatan 12430, Indonesia